

Katalog : 4102004.6472

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA SAMARINDA

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA SAMARINDA

2021

<https://samarindakota.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAMARINDA 2021/2022

Nomor Publikasi : 64720.2218

Katalog : 4102004.6472

Ukuran Buku : 17,5 x 25,0 cm

Jumlah halaman : xiv + 70

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Dicetak Oleh :

CV. Mahendra Mulya

Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, dan/atau Menggunakan Sebagian atau Seluruh Isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab:

Roosmawati, SE, MM.

Penyunting:

Norlatifah, S.Si, M.Stat.

Penulis:

Salman Basri, S.Si

Pengolah Data:

Nanda Sekar Asmara, SST

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan ijinNya publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda 2021/2022** ini dapat terbit sesuai yang diharapkan. Publikasi ini merupakan publikasi berkala yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Dalam publikasi ini disajikan data indikator makro yang berguna sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam penyajian publikasi ini, format dan sistematika penyajian hampir sama dengan penyajian tahun sebelumnya, yang meliputi indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya. Sumber utama data yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan dilengkapi data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi terkait.

Terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang mendatang, dan kami berharap data yang disajikan dalam publikasi ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan, baik instansi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Samarinda, November 2022

Kepala BPS Kota Samarinda

Roosmawati SE., MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 KEPENDUDUKAN.....	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	2
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan	7
1.4 Fertilitas dan KB	9
1.5 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama	11
BAB 2 KESEHATAN DAN GIZI	17
2.1 Derajat Status Kesehatan Penduduk	18
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	211
BAB 3 PENDIDIKAN.....	255
3.1 Angka Melek Huruf (AMH)	266
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	28
3.3 Tingkat Pendidikan.....	29
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)	31
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan.....	33
BAB 4 KETENAGAKERJAAN.....	37
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	38
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	40
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	41

4.4 Jumlah Jam Kerja.....	44
4.5 Upah Minimum	45
BAB 5 TINGKAT DAN POLA KONSUMSI.....	49
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	49
5.2 Penduduk Miskin.....	555
BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	57
6.1 Kualitas Rumah Tinggal.....	58
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	59
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	611
BAB 7 SOSIAL LAINNYA	63
7.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	64
7.2 Program Pelindungan Sosial dan Pelayanan Kesehatan...	66
7.3 Kondisi Keamanan	691

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Samarinda, 2020-2021	3
Tabel 1.2	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Samarinda, 2021	6
Tabel 1.3	Angka Beban Ketergantungan Kota Samarinda, 2020-2021 (persen).....	8
Tabel 1.4	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Alat/Cara KB di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen)...	11
Tabel 1.5	Persentase Penduduk berumur 10 tahun keatas Menurut Status Perkawinan di Kota Samarinda, 2021 (persen)	13
Tabel 1.6	Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen)	14
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Mampu Membaca dan Menulis Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2018 – 2021 (persen)	277
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	322
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Samarinda, 2018 – 2021 (persen)	333
Tabel 3.4	Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid, dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022.....	344
Tabel 3.5	Rasio Murid-Guru dan Guru-Sekolah di Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022	355

Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Samarinda Menurut Jenis Kelamin di Kota Samarinda, 2018-2022 (persen)	39
Tabel 4.2	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	401
Tabel 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen)	422
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	433
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Menurut Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jam Kerja di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	455
Tabel 4.6	Upah Minimum Kota Samarinda dan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur, 2017 – 2022	48
Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Samarinda, 2020 – 2021	500
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran di Kota Samarinda, 2021 (Rupiah).....	533
Tabel 5.3	Rata-rata Pengeluaran, <i>RSE</i> Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Samarinda, 2021 ..	544
Tabel 5.4	Rata-rata Pengeluaran, <i>RSE</i> Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kota Samarinda, 2021	555
Tabel 5.5	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda, Tahun 2017 – 2021	56

Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga di Kota Samarinda Menurut Luas Lantai Rumah per kapita, 2018 – 2021 (persen)	58
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga di Kota Samarinda menurut Fasilitas Rumah Tinggal, 2018-2021 (persen)	600
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Samarinda, 2017 – 2021 (persen).....	622
Tabel 7.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	68

<https://samarindakota.bps.go.id>



<https://samarindakota.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2021 (Jiwa).....	5
Gambar 2.1	Angka Keluhan Kesehatan Kota Samarinda, 2016-2021 (persen).....	19
Gambar 2.2	Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	22
Gambar 2.3	Persentase Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	23
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Kota Samarinda yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan, 2021 (persen).....	23
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Samarinda, 2016 – 2021 (tahun).....	28
Gambar 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Terakhir) di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	30
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	511
Gambar 7.1	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan yang Diterima di Kota Samarinda, 2021 (persen).....	67
Gambar 7.2	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen).....	69

BAB 1

KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan selalu menjadi isu yang kian mengemuka dan berkaitan dengan pertumbuhannya menjadi modal dasar dalam pembangunan, seiring dengan terjadinya hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti halnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk.

Masalah kependudukan memiliki posisi yang penting bagi pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program terkait. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan program kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Melalui data kependudukan juga dapat diketahui keadaan dan kondisi kependudukan daerahnya. Hal ini dikarenakan jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah menjadikan penduduk tersebut beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.

Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat pula menimbulkan terjadinya kelaparan dan menurunnya tingkat kesehatan penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman liar, kumuh dan tidak layak huni akibat sempitnya

lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul di antaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Dalam sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2020, penduduk dihitung berdasarkan sistem *de facto* dan *de jure*. Berdasarkan sistem *de facto* seseorang dihitung sebagai penduduk suatu daerah dimana dia berada pada saat sensus. Dalam sistem *de jure* seseorang dihitung sebagai penduduk suatu daerah tertentu berdasarkan tempat tinggal biasanya, tidak melihat/memperhitungkan dimana dia berada pada saat sensus. Jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Laju perubahan pada masing-masing faktor tersebut sangat menentukan besaran jumlah dan struktur penduduk di kota Samarinda.

Jumlah penduduk kota Samarinda menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, berdasarkan hasil Sensus Penduduk

2020 penduduk Kota Samarinda berjumlah sebanyak 827.994 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Samarinda bertambah 3.466 jiwa menjadi 831.460 jiwa.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Samarinda, 2020-2021

Jenis Kelamin	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020 per Tahun (%)
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	422.624	423.769	0,27
Perempuan	405.370	407.691	0,57
Total	827.994	831.469	0,42
Rasio Jenis Kelamin	104,26	103,94	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Adanya pertumbuhan penduduk mengakibatkan perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan peningkatan proporsi anak-anak usia di bawah 15 tahun dilanjutkan dengan peningkatan proporsi penduduk usia kerja dan peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) secara perlahan. Besar kemungkinan peningkatan tingkat pertumbuhan ini sebagai dampak tingginya migrasi masuk ke Kota Samarinda. Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan menjadi tantangan baru dimana peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk usia kerja akan berdampak pada tuntutan perluasan kesempatan kerja.

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda pada tahun 2021 sebesar 0,42 persen dibandingkan tahun 2020.

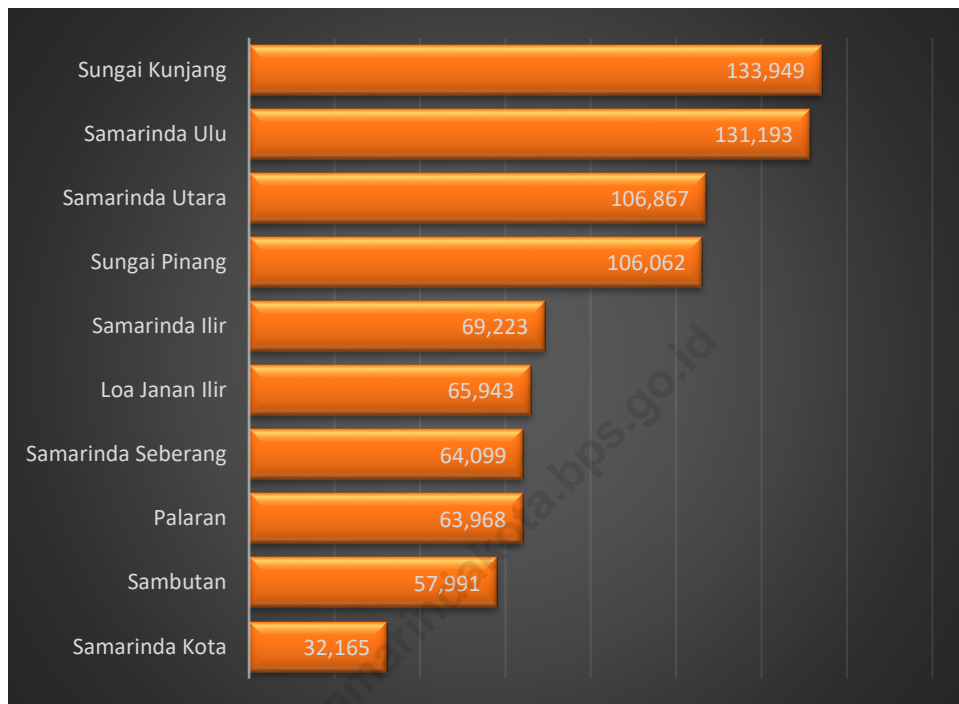
Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Samarinda pada tahun 2020 sebesar 104,26. Sementara angka rasio jenis kelamin penduduk Samarinda pada tahun 2021 sebesar 103,94. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Samarinda lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Salah satu faktor lebih tingginya jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah penduduk perempuan di Kota Samarinda disebabkan adanya migrasi masuk sebagai pencari kerja berjenis kelamin laki-laki.

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menentukan program-program pembangunan agar tepat sasaran adalah dengan melihat angka kepadatan penduduk. Dari angka tersebut, dapat diketahui bagaimana persebaran penduduk kota Samarinda terkait kecamatan mana saja yang memiliki kepadatan penduduk tinggi maupun rendah. Sehingga penerapan pembangunan yang berpusat pada penduduk dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Persebaran penduduk merupakan distribusi penduduk menurut wilayah. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi. Perbedaan tingkat distribusi dan

kepadatan penduduk antarwilayah dipengaruhi oleh faktor mobilitas sosial sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Persebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2021 (Jiwa)

Persebaran penduduk Kota Samarinda pada tahun 2021, dapat dikatakan masih kurang merata. Lebih dari lima puluh persen penduduk kota Samarinda bermukim di empat Kecamatan yakni Kecamatan Sungai Kunjang (16,11 persen), Kecamatan Samarinda Ulu (15,78 persen), Kecamatan Samarinda Utara (12,85 persen), dan Kecamatan Sungai Pinang (12,76 persen). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Samarinda Kota (3,87 persen).

Berdasarkan angka Kepadatan penduduk, secara umum kepadatan penduduk kota Samarinda tahun 2021 adalah sebesar 1.158,02 jiwa/km². Kemudian apabila dirinci berdasarkan menurut kecamatan, terlihat bahwa

Kecamatan Samarinda Ulu merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan sebesar 5.930,97 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada di wilayah Kecamatan Palaran (289,07 jiwa/km²).

Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Samarinda, 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)
Palaran	221,29	289,07
Samarinda Seberang	12,49	5.132,03
Loa Janan Ilir	26,13	2.523,65
Sambutan	100,95	574,45
Samarinda Ilir	17,18	4.029,28
Samarinda Kota	11,12	2.892,54
Sungai Kunjang	43,04	3.112,20
Samarinda Ulu	22,12	5.930,97
Samarinda Utara	229,52	465,61
Sungai Pinang	34,16	3.104,86
Kota Samarinda	718,00	1.158,02

Sumber : Badan Pusat Statistik

Migrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong dari daerah asal dan juga faktor penarik daerah tujuan. Salah satu penyebab persebaran penduduk yang kurang merata adalah besarnya daya tarik migrasi yang ada di kecamatan padat penduduk, misalnya ketersediaan fasilitas umum dan lapangan kerja. Dengan kata lain, migrasi penduduk cenderung terjadi ke wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan. Migrasi diyakini juga

sebagai salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan, dimana penduduk sebagai penyedia *input* faktor produksi akan mendorong peningkatan intensitas aktivitas ekonomi non pertanian di wilayah pusat pertumbuhan. Namun di sisi lain, peningkatan kepadatan penduduk, terutama di wilayah perkotaan berpotensi menciptakan tekanan pada sumber daya alam, seperti ketersediaan lahan dalam memenuhi peningkatan permintaan hunian. Oleh karena itu, persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan. dan perlu dilakukan langkah-langkah pemerataan fasilitas umum dan juga ketersediaan lapangan kerja untuk mendorong persebaran penduduk yang lebih merata.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun. Dalam hal ini, pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana untuk tumbuh kembang anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain. Sebaliknya,

wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Tabel 1.3 Angka Beban Ketergantungan Kota Samarinda, 2020-2021 (persen)

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun ke atas	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	24,53	70,74	4,73	41,37
2021	24,07	70,95	4,98	40,94

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga tercermin pada perubahan komposisi penduduk menurut usia seperti dengan semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Karena dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan angka beban tanggungan kota Samarinda sebesar 41,37 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41-42 penduduk usia tidak produktif. Sementara pada tahun 2021, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 40,94 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 41 penduduk tidak produktif (di bawah usia 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas).

Dengan angka beban ketergantungan sebesar 40,94 di tahun 2021, kondisi penduduk usia produktif di kota Samarinda menjadi sangat

potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Hal ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara menyiapkan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

1.4 Fertilitas dan KB

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan berisiko menghambat pembangunan nasional.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan *Implant*. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Seperti diketahui, tujuan utama program KB adalah pengendalian jumlah penduduk sehingga tercapainya keluarga bahagia dan sejahtera. Keberhasilan dari tujuan mulia ini tergantung dari ketepatan sasarannya yaitu pada perempuan kawin yang berusia 15-49 tahun, dan diupayakan dengan memakai alat kontrasepsi dapat mengendalikan kelahiran seperti pengaturan jumlah anak yang dilahirkan dan jarak antar kelahiran.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Dilihat dari jenis alat/cara KB yang digunakan, sebagian besar dari akseptor KB aktif menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, meliputi suntik KB, pil KB, dan kondom/karet KB yakni sebesar 72,21 persen. Dilihat dari jenis alat KB yang digunakan, sebanyak 35,86 persen akseptor KB aktif menggunakan suntikan KB, disusul oleh penggunaan Pil KB sebesar 30,53 persen.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Alat/Cara KB di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen)

Alat/Cara KB	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Suntikan	40,40	39,75	35,86
Pil KB	35,21	31,90	30,53
AKDR/ IUD/ Spiral	11,60	8,61	15,15
Susuk KB	3,54	3,61	4,20
MOW/Tubektomi	4,87	3,41	5,60
Kondom/Karet KB	0,80	3,37	5,82
MOP/ Vasektomi	1,24	0,00	0,33
Pantang Berkala	1,56	1,62	2,07
Lainnya	0,77	7,73	0,44
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sedangkan akseptor KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, yang meliputi tubektomi/MOW, vasektomi/MOP, spiral/IUD, dan Susuk KB/Implan, sebanyak 25,28 persen. Dan masih terdapat 2,51 persen perempuan usia 15-49 tahun yang saat ini masih menggunakan metode KB secara tradisional.

1.5 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Konsep perkawinan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (perkawinan *de jure*) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Konsep ini dipakai terutama untuk mengaitkan status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang-pendeknya perkawinan atau hidup bersama ini. Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan perkawinan secara agama maupun secara undang-undang. Tetapi untuk keperluan studi demografi, Badan Pusat Statistik mendefinisikan seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 2000).

Menurut status perkawinan dari penduduk 10 tahun ke atas, pada tahun 2021 tercatat sebesar 56,16 persen penduduk kota Samarinda telah berstatus kawin. Kemudian 37,59 persen belum kawin, sebanyak 2,81 persen cerai hidup, dan 5,24 persen cerai mati. Status perkawinan cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) umumnya banyak dialami oleh perempuan yakni 11,54 persen dibandingkan oleh laki-laki yang hanya 4,67 persen.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk berumur 10 tahun keatas Menurut Status Perkawinan di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	39,47	32,00	35,79
Kawin	55,86	56,46	56,16
Cerai Hidup	2,27	3,36	2,81
Cerai Mati	2,40	8,18	5,24
Kota Samarinda	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Jika dilihat lebih rinci, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (39,47 persen) lebih besar dibandingkan penduduk perempuan (32,00 persen). Sebaliknya, proporsi penduduk perempuan yang berstatus kawin (56,46 persen) lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki (55,86 persen).

Ditinjau dari usia perkawinan pertama, pada tahun 2021 terdapat sekitar 11,38 persen penduduk perempuan berusia lebih dari 10 tahun yang kawin pertama kali sebelum berusia 16 tahun. Sementara yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun sekitar 16,30 persen. Selain itu dari total penduduk wanita usia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin sekitar 22,38 persen kawin pada usia 19-20 tahun. Sedangkan yang melakukan perkawinan pertama di atas usia 21 tahun ke atas adalah sebanyak 49,94 persen.

Tabel 1.6 Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen)

Kelompok Umur	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 16	11,66	11,22	11,38
17 - 18	15,68	17,39	16,3
19 - 20	21,10	22,47	22,38
21+	51,56	58,14	49,94

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pergeseran masa usia perkawinan pertama menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama semakin meningkat. Pada usia 10-15 tahun, seorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Semakin tinggi usia perkawinan pertama wanita diduga karena banyaknya perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, semakin banyaknya perempuan yang bekerja secara langsung akan memberi dampak pada semakin tingginya usia perkawinan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Samarinda telah memiliki kesetaraan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan.

Tersedianya indikator rata-rata usia kawin pertama akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak tergesa-gesa memasuki jenjang pernikahan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah.

Bagi pelaksanaan program KB diketahuinya rata-rata usia perkawinan pertama akan memudahkan para perencana program untuk mengembangkan kegiatan penyuluhan penundaan kehamilan anak pertama dan persiapan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

<https://samarindakota.bps.go.id>

BAB 2

KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Selain langkah-langkah pengobatan, langkah-langkah pencegahan penyakit juga perlu dilakukan. Beberapa faktor yang dapat memperburuk kesehatan masyarakat diantaranya adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, minimnya sarana kesehatan, serta keadaan sanitasi lingkungan yang buruk. Faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan terletak pada masyarakat sendiri, sebagai subyek sekaligus obyek dari upaya tersebut. Penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya bangsa Indonesia.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase

balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1 Derajat Status Kesehatan Penduduk

Salah satu perwujudan dari usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negaranya untuk mendapat derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah adalah melalui subsidi di bidang kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Kebijakan pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan angka harapan hidup penduduk.

Angka harapan hidup waktu lahir untuk Kota Samarinda pada tahun 2021 ini mencapai 74,54 tahun. Ini berarti bahwa, bayi yang baru lahir di Samarinda dapat bertahan hidup usia 74 sampai 75 tahun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup dari tahun ke tahun sebagai indikasi dari adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk

yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut yang ditunjukkan dengan angka kesakitan yang semakin tinggi di wilayah tersebut.

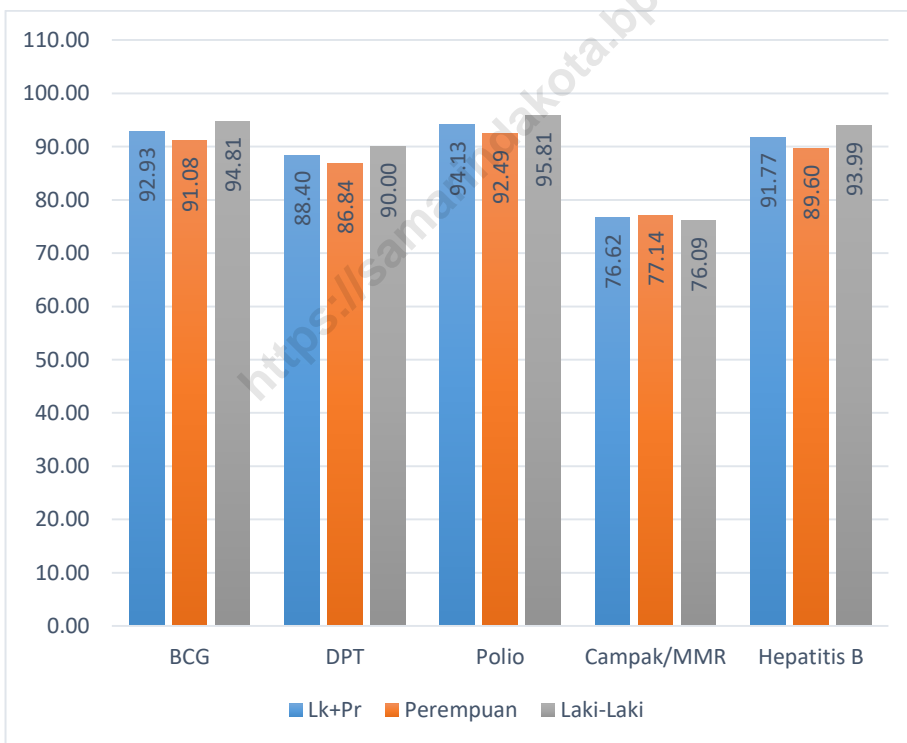
Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa Angka Keluhan Kesehatan Kota Samarinda tahun 2021 adalah 30,38. Artinya, pada tahun 2021, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ada sebanyak 30,38 persen dari total penduduk Kota Samarinda. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang mencapai 22,90 persen.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 2.1 Angka Keluhan Kesehatan Kota Samarinda, 2016-2021 (persen)

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/MMR dan Hepatitis B.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 2.2 Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kota Samarinda, 2021 (persen)

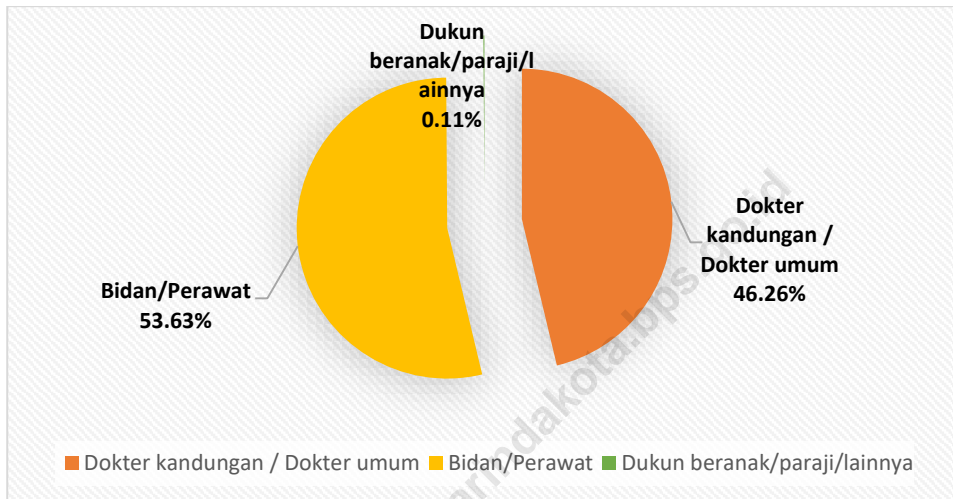
Berdasarkan hasil Susenas 2021, secara umum persentase balita laki-laki yang pernah mendapat imunisasi wajib lebih besar persentasenya dibandingkan dengan anak perempuan. Sebanyak 92,93 persen balita telah mendapat imunisasi BCG, 88,40 persen balita mendapat imunisasi DPT, 94,13 persen balita mendapat imunisasi Polio, 76,62 persen balita mendapat imunisasi Campak/MMR, dan 91,77 persen mendapat imunisasi Hepatitis B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Kota Samarinda kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemberian setiap jenis imunisasi bagi balitanya sudah cukup baik.

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun atau lainnya, karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian, masih ada

persalinan yang ditolong oleh dukun dan tenaga lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan ketersediaan sarana/prasarana kesehatan. Selain itu, faktor pendidikan dari masyarakat juga turut mempengaruhi dalam hal pemilihan penolong persalinan.



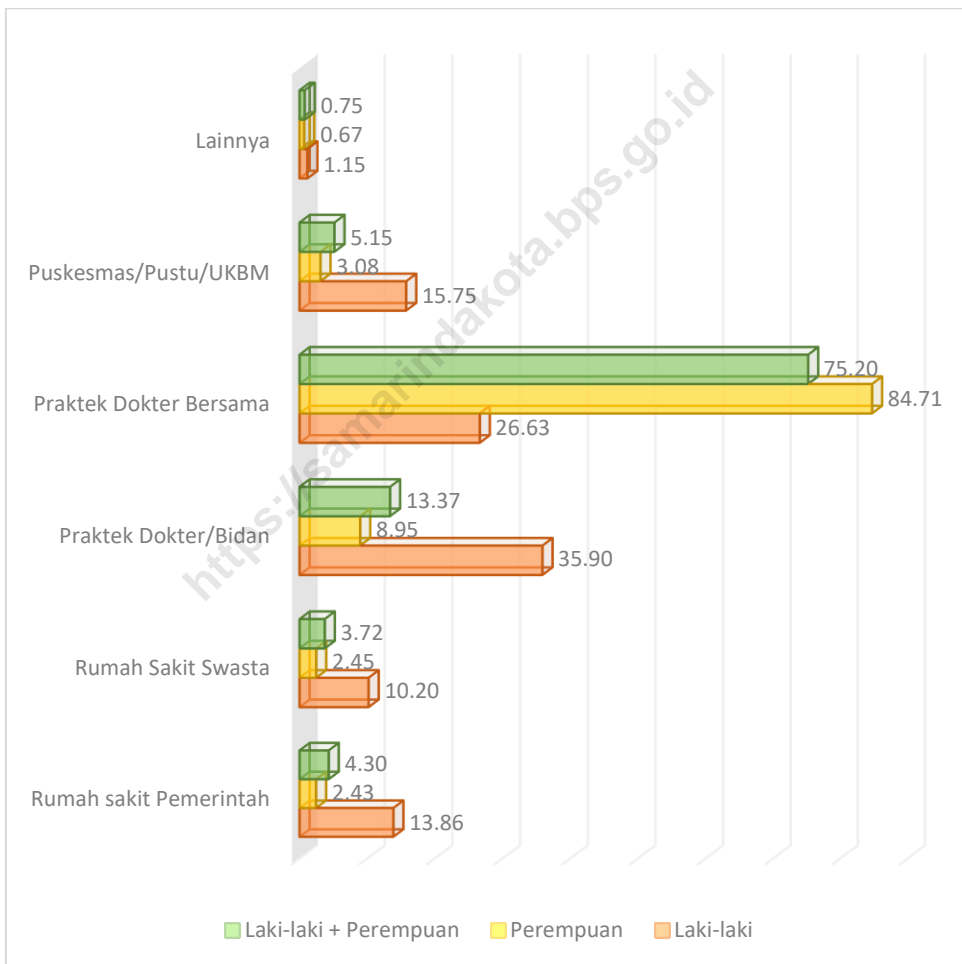
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 2.3 Persentase Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Pada tahun 2021 di Kota Samarinda, sebanyak 99,89 persen persalinan yang ditolong oleh tenaga medis terlatih seperti dokter dan bidan, hal ini dapat menggambarkan kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan persalinan yang berpengaruh pada menurunnya angka kematian ibu dan anak pada saat persalinan. Walau demikian masih terdapat 0,11 persen proses persalinan di kota Samarinda yang ditolong oleh dukun beranak/paraji atau tenaga non medis lainnya.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga

harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Kota Samarinda yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan, 2021 (persen)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, pada tahun 2021, Kota Samarinda memiliki 27 unit puskesmas. Dilihat dari jangkauan pelayanan berdasarkan rasio fasilitas pelayanan kesehatan, diperoleh gambaran bahwa satu unit Puskesmas dapat melayani sekitar 31 ribu penduduk, Kota Samarinda juga memiliki 8 unit rumah sakit yang artinya 1 unit rumah sakit diharapkan dapat melayani sekitar 104 ribu penduduk. Sementara itu, jumlah dokter di Kota Samarinda pada tahun 2021 sebanyak 715 orang, sehingga dapat diketahui bahwa rasio dokter per 10.000 penduduk tercatat sebesar 8,64 yang artinya secara umum / rata-rata 10 ribu penduduk Kota Samarinda dapat dilayani oleh 8-9 orang dokter.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Secara umum di kota Samarinda, terjadi perubahan sikap masyarakat yang lebih baik terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2021, sebagian besar penduduk yang berobat jalan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih seperti berobat pada praktek dokter bersama (75,20 persen) dan praktek dokter/bidan (13,37 persen). Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/tidak terlatih/tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu daerah bahkan negara.

BAB 3

PENDIDIKAN

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan investasi kemanusiaan (*human investment*) bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa dan menjadi kebutuhan mendasar bagi penduduk sebagai sarana mutlak untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan, sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peranan pendidikan juga mempersiapkan sumber daya yang berkualitas sehingga membawa manfaat nyata bagi pembangunan. Tolak ukur ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tingkat pendidikan penduduknya.

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia dalam rangka mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup (Sept. P & K, 1976). Kenyataan saat ini menunjukkan masyarakat sudah memiliki kepedulian yang tinggi dalam hal ini. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila di segi lain bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Tetapi kepedulian tersebut akan kurang efektif bila pemerataan kesempatan pendidikan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang mampu. Untuk itu pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan melaksanakan kebijakan pendidikan yaitu Gerakan Wajib Belajar 12 tahun ditambah pengalokasikan anggaran pendidikan

sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan amanat undang-undang.

3.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator dasar untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan salah satunya adalah keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta huruf. Membaca dan menulis merupakan syarat yang paling utama untuk dapat menerima/memahami informasi serta untuk dapat turut aktif berperan dalam pembangunan. Upaya ini dilakukan selain melalui pendidikan formal juga melalui pendidikan non formal seperti kelompok belajar (Kejar) Paket A dan kelompok belajar Paket B.

Mulai tahun 1973/1974 pemerintah melaksanakan program Inpres SD, yang kemudian diikuti dengan pencanangan wajib belajar enam tahun pada tahun 1984. Selanjutnya dengan keberhasilan wajib belajar enam tahun disusunlah sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 dan diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 1994 untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan menjangkau penduduk di daerah terpencil. Keberhasilan program wajib belajar terlihat secara nyata pada penurunan persentase penduduk yang buta huruf dan peningkatan angka partisipasi sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan

wilayah mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Mampu Membaca dan Menulis Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2018 – 2021 (persen)

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	99,05	98,28	98,68
2019	97,63	96,72	99,31
2020	99,57	98,97	99,28
2021	99,27	99,02	99,18

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

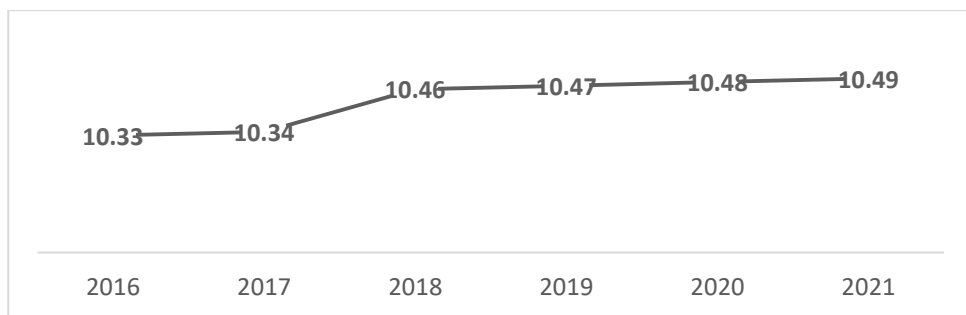
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, angka melek huruf di Kota Samarinda pada tahun 2021 berada di atas 99 persen yang menunjukkan belum seluruh penduduk kota Samarinda usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Pada 4 tahun terakhir, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Walaupun program pemberantasan buta aksara telah menunjukkan adanya keberhasilan, program ini harus terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.



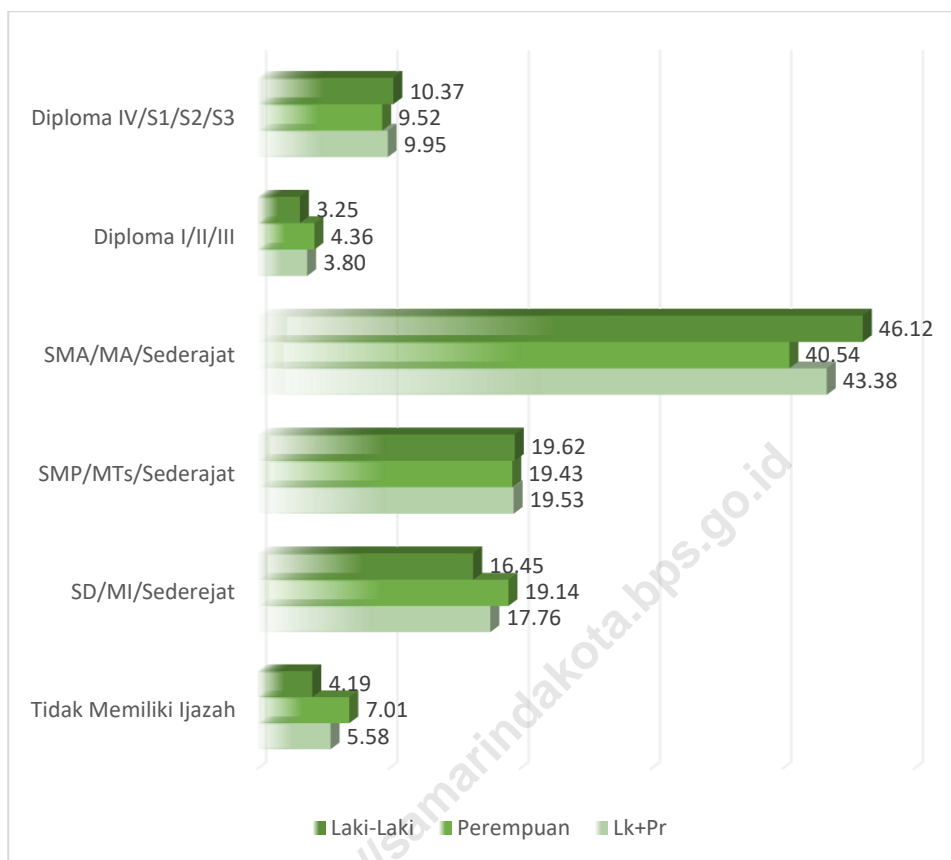
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Samarinda, 2016 – 2021 (tahun)

Rata-rata lama sekolah Kota Samarinda pada tahun 2021 mencapai 10,49 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Samarinda telah mampu menempuh pendidikan selama 10,49 tahun atau sampai kelas 1 SMA, meskipun belum mencapai target wajib belajar 12 tahun namun angka ini menunjukkan bahwa selama 6 tahun terakhir rata-rata lama sekolah di Kota Samarinda terus mengalami kenaikan. Hal ini merupakan pertanda positif bahwa penduduk di Kota Samarinda sudah mengerti pentingnya pendidikan bagi masa depan yang lebih baik.

3.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Terakhir) di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Pada tahun 2021, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMA adalah yang paling banyak dibandingkan penduduk yang menamatkan pendidikannya di jenjang lainnya yaitu sebesar 43,38 persen. Sedangkan jenjang pendidikan Diploma I/II/III adalah yang terkecil persentasenya yaitu hanya sebesar 3,80 persen. Namun yang perlu mendapat perhatian bahwa masih ada sekitar 5,58 persen penduduk umur 15 tahun ke atas yang belum berijazah. Diharapkan kesadaran masyarakat akan terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak

bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat semakin menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan setara.

APS atau Angka Partisipasi Sekolah didapatkan berdasarkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhnya) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, secara umum APS Kota Samarinda semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kota Samarinda, sekitar 99,81 persen penduduk dalam rentang usia 7-12 tahun telah memasuki jenjang sekolah. Selanjutnya nilai APS pada rentang usia 13-15 tahun naik menjadi 99,98 persen, dan turun lagi menjadi sebesar 84,23 persen pada rentang usia 16-18 tahun. Tingginya angka partisipasi bersekolah yang terdapat pada kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun serta 16-18 tahun ini menunjukkan bahwa pengaruh program pendidikan wajib belajar dasar 12 tahun yang dicanangkan

pemerintah bagi anak-anak yang telah berusia 7 tahun telah menunjukkan hasil.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	100,00	99,59	99,81
13 – 15	99,95	100,00	99,98
16 – 18	88,33	79,53	84,23
19 – 24	N/A	N/A	N/A

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Data APS kelompok umur 19-24 tidak tersedia

Selain APS, indikator Angka Partisipasi Murni juga sangat membantu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan. APM menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

Nilai APM (Laki-laki + Perempuan) per jenjang pendidikan di Kota Samarinda cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kecenderungan penduduk usia tepat 7 tahun telah memasuki jenjang pendidikan SD dan berlanjut terus ke jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga terjadi kesesuaian antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Samarinda, 2018– 2021 (persen)

Jenis Kelamin	Jenjang Sekolah	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	SD/Sederajat	99,02	99,32	98,95	99,51
	SMP/Sederajat	75,81	77,57	77,54	77,31
	SMA/Sederajat	67,79	66,97	62,63	74,12
	PT	...	34,19	37,35	...
Perempuan	SD/Sederajat	100,00	99,16	99,68	99,59
	SMP/Sederajat	72,34	78,28	82,43	83,01
	SMA/Sederajat	64,85	64,26	70,19	57,55
	PT	...	48,56	48,04	...
Laki-Laki dan Perempuan	SD/Sederajat	98,40	99,24	99,28	99,55
	SMP/Sederajat	79,68	77,92	80,27	80,52
	SMA/Sederajat	68,43	65,71	66,45	66,40
	PT	...	40,89	42,21	...

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Data APM tahun 2018 dan 2021, Jenjang PT tidak tersedia

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, dan rasio murid-kelas.

Tabel 3.4 Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid, dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022

Uraian	Tingkat Pendidikan	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah (unit)	SD	221	224
	SMP	93	94
	SMA/SMK	93	94
Murid (orang)	SD	82.016	80.481
	SMP	34.161	34.138
	SMA/SMK	39.714	40.864
Guru (orang)	SD	4.099	3.980
	SMP	1.968	1.946
	SMA/SMK	2.356	2.346

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Pada tahun ajaran 2021/2022 jumlah murid di semua tingkat pendidikan sebanyak 155.483 murid, yang terdiri dari 80.481 murid Sekolah Dasar (SD), 34.138 murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 40.864 murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara, jumlah fasilitas sekolah di Samarinda adalah sebanyak 224 unit SD, 94 unit SMP, dan 42 unit SMA serta 52 unit SMK. Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Utara adalah dua kecamatan yang memiliki fasilitas sekolah yang terbanyak, hal ini sejalan dengan besarnya proporsi jumlah penduduk pada kedua kecamatan tersebut.

Dilihat dari jumlah sekolah, terjadi penambahan 3 unit SD, 1 unit SMP, dan 1 unit SMA/SMK dibanding tahun ajaran sebelumnya. Di lain pihak, jumlah guru serta murid umumnya mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi perhatian karena guru juga berperan penting dalam mensukseskan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, dimana

guru menjadi sumber daya yang harus terpenuhi untuk mengimbangi jumlah siswa.

Tabel 3.5 Rasio Murid-Guru dan Guru-Sekolah di Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022

Indikator	Tingkat Pendidikan	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio Murid-Guru	SD	20,01	20,22
	SMP	17,36	17,54
	SMA/SMK	16,86	17,42
Rasio Guru-Sekolah	SD	18,55	17,77
	SMP	21,16	20,70
	SMA/SMK	25,33	24,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajar akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan

pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Secara umum, pada tahun ajaran 2021/2022 rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan di Samarinda berada di bawah angka 21. Untuk jenjang SD sebesar 20,22; SMP sebesar 17,54; dan SMA/SMK sebesar 17,42. Terlihat, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin turun pula rasio murid per guru.

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu, sebaliknya makin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, untuk kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Pada tahun 2021/2022 rasio guru-sekolah pada jenjang SD sebesar 17,77; SMP sebesar 20,70; dan SMA/SMK sebesar 24,96. Dari pola tersebut, tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula rasio guru per sekolah.

BAB 4

KETENAGAKERJAAN

Fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Masalah tenaga kerja selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini karena masalah tersebut merupakan masalah sensitif yang harus segera diselesaikan. Bila tenaga kerja tidak terserap dengan optimal, maka perekonomian juga akan sulit untuk tumbuh secara maksimal. Ditambah lagi dengan dampak tak langsung pengangguran terhadap kondisi sosial di masyarakat. Pengangguran yang tinggi identik dengan pertumbuhan angka kemiskinan. Salah satu dampak dari tingginya kemiskinan adalah tingkat kriminalitas yang juga akan meningkat.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang cuti. Selain itu, penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (penganggur) termasuk juga dalam angkatan kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. TPT dapat mencerminkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dikenal sebagai penduduk usia kerja pada tahun periode Agustus 2022 mencapai lebih dari 673.836 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja mencapai 424.229 orang. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja

mencapai 249.607 orang atau sebanyak 37,04 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Samarinda Menurut Jenis Kelamin di Kota Samarinda, 2018-2022 (persen)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,32	65,40	65,16	64,29	62,96
• Laki-Laki	80,01	80,48	79,17	78,84	78,54
• Perempuan	41,23	49,18	50,49	49,12	46,79
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,16	5,87	8,25	8,16	6,78
• Laki-Laki	5,99	6,13	8,80	8,61	5,20
• Perempuan	6,52	5,40	7,36	7,40	9,52

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Dari tabel 4.1 diatas, dapat kita lihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kota Samarinda tahun 2022 mencapai 62,96 persen. Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan.

Nilai TPT tahun 2022 yakni sebesar 6,78 persen, Nilainya terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 (8,25), 2021 (8,16). TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Angka TPT sebesar 6,78 menggambarkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang menganggur. Kondisi ini tidak terlepas dari efek dari pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia. Dengan adanya angka tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat mempersiapkan lapangan kerja baru agar potensi kerawanan sosial dapat dicegah.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Tingginya TPAK laki-laki menunjukkan bahwa perempuan banyak yang memilih melakukan kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya.

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Salah satu harapan seseorang dalam mengenyam pendidikan yang tinggi adalah agar kelak mendapatkan pekerjaan yang layak. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula harapan orang tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum tentu terjadi. Jumlah lapangan pekerjaan yang masih belum memadai serta jenis pekerjaan yang semakin spesifik dan ditambah lagi mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang yang menjadi keahliannya, akan membuat para pencari kerja tidak terserap pada suatu lapangan usaha. Sehingga hal ini akan menjadikan mereka sebagai penganggur.

Tabel 4.2 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	
(1)	(3)	(4)	(5)
≤ SD sederajat	97,00	3,00	100,00
SMP sederajat	92,61	7,39	100,00
SMA sederajat	89,55	10,46	100,00
> SMA sederajat	91,28	8,72	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2021, persentase penduduk angkatan kerja yang menganggur paling tinggi adalah penduduk dengan ijazah tertinggi pada tingkat SMA sederajat sebesar 10,46 persen. Demikian pula persentase penduduk angkatan kerja yang menganggur pada tingkat di atas SMA sederajat, persentasenya juga cukup tinggi mencapai sebesar 8,72 persen. Terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai kualifikasi pendidikan baik di SMA sederajat atau di universitas menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terdidik.

Secara umum persentase pengangguran justru kecil pada penduduk dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Fenomena ini dapat disebabkan mereka yang berpendidikan rendah, memang memilih untuk langsung bekerja, baik dengan alasan ekonomi maupun alasan lainnya. Mereka juga memilih tetap bekerja meskipun dengan gaji minim ketimbang memasuki bangku pendidikan formal.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Selain mengetahui banyaknya penduduk yang bekerja maupun mencari pekerjaan, pengetahuan terhadap kondisi lapangan pekerjaan yang ada juga penting. Dengan mengetahui kondisi lapangan pekerjaan yang ada di kota Samarinda, pemerintah bisa mengetahui lapangan pekerjaan yang mana yang masih bisa dikembangkan atau perlu mendapat perhatian lebih. Mengingat masih banyaknya pencari di Kota Samarinda, maka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap pekerja masih perlu dikembangkan. Berikut ini disajikan gambaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha yang terdiri dari tiga sektor yaitu **pertanian** (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan), **manufaktur** (pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik,

gas dan air minum; serta konstruksi), dan **jasa-jasa** (perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan & jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan).

Biasanya semakin maju tingkat pembangunan suatu daerah, semakin tinggi persentase penduduk yang bekerja di sektor dengan produktivitas dan tingkat upah tinggi. Dalam hal ini perubahan kontribusi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja merupakan indikator perubahan struktur yang biasa digunakan. Ini disebabkan pada umumnya sektor industri mempunyai produktivitas dan struktur upah yang lebih tinggi dari sektor pertanian. Tingginya kontribusi sektor pertanian, sebaliknya merefleksikan masih “tradisional” nya struktur perekonomian suatu daerah.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda, 2019 – 2021 (persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	2,95	5,39	6,29
2. Manufaktur	21,92	21,25	18,83
3. Jasa-jasa	75,13	73,36	74,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dalam 3 tahun terakhir, sebagian besar penduduk kota Samarinda bekerja di sektor jasa-jasa yakni sebesar 75,13 persen (2019), 73,36 persen (2020),

dan 74,88 persen (2021). Sektor manufaktur hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 18,83 persen. Sisanya, 6,29 persen bekerja di sektor pertanian.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	14,52	21,50	17,16
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	8,10	10,51	9,01
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,04	2,31	4,01
Buruh/Karyawan/Pegawai	61,55	48,45	56,61
Pekerja bebas	6,48	1,25	4,50
Pekerja keluarga/tak dibayar	4,31	15,98	8,71
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan status pekerjaan, pada tahun 2021 lebih dari separuh tenaga kerja yakni sebesar 56,61 persen merupakan buruh/karyawan/pegawai. Proporsi terbesar ke dua setelah buruh/karyawan/pegawai yakni tenaga kerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri sebesar 17,16 persen.

Tenaga kerja dengan status berusaha sebanyak 30,18 persen, hal ini menjadi sinyal yang positif bagi perekonomian di kota Samarinda. Banyaknya wirausaha memberikan dampak positif antara lain akan

menambah jenis usaha baru sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, dapat ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha dengan memberikan akses terhadap fasilitas, pelatihan, pendidikan maupun modal sehingga dapat tercipta wirausahawan baru yang akan membantu meningkatkan perekonomian kota Samarinda.

4.4 Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja tak penuh dimana mereka bekerja di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam karena mereka mendapatkan pekerjaan yang belum sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Menurut Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jam Kerja di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Jumlah Jam Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0*	2,85	3,52	3,10
1 – 9	2,19	5,72	3,51
10 – 14	1,66	6,25	3,40
15 – 34	18,15	26,84	21,43
35+	75,15	57,67	68,55
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Keterangan : *) sementara tidak bekerja

Pada tahun 2021, persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam ada sebanyak 28,35 persen. Jam kerja dapat juga dianggap sebagai salah satu indikator produktivitas pekerjaan, jika jam kerja diatas 35 jam maka semakin tinggi juga produktivitas pekerjaannya.

4.5 Upah Minimum

Sistem pengupahan disuatu negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah (Payaman Simanjuntak 1998:129), yaitu: (1). Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, (2). Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan (3). Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, maka upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya. Definisi penghasilan atau imbalan yang diterima karyawan atau pekerja, menurut Sonny Sumarsono, ada empat (2003:140), yaitu: (1). Upah atau gaji dalam bentuk uang, (2). Tunjangan dalam bentuk natura, (3). Fringe Benefit, dan (4). Kondisi Lingkungan Kerja.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR)
3. Produktivitas marginal tenaga kerja
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha
5. Perbedaan jenis pekerjaan

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tiap wilayah kabupaten dan kota akan berbeda. Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor

11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

Dalam PP 36/2021, penentuan Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan memerhitungkan batas atas dan bawah upah minimum.

Formula:

Rumus batas atas:

Batas atas $UM_{(t)} = (\text{Rata-rata konsumsi per kapita}_{(t)} \times \text{Rata-rata banyaknya ART}_{(t)} / \text{Rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}_{(t)})$

Rumus batas bawah:

Batas bawah $UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$

Rumus Upah Minimum yang akan ditetapkan, sebagai berikut:

$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{ \text{Max} (PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times (\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)} / \text{Batas Atas}_{(t)} - \text{Batas Bawah}_{(t)}) \times UM_{(t)} \}$

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam UU no. 13 tahun 2013 pasal 88 ayat 1. Selain itu, dalam Undang–undang tersebut juga tercantum tentang kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi para pekerja atau buruh.

Upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/UMK) merupakan sebuah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha dan perusahaan untuk menetapkan besarnya upah untuk para pekerjanya.

Selain itu, UMP/UMK juga dijadikan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan pada suatu daerah, dimana pendapatan yang didapat dari pekerja rata-rata seperti standar UMP/UMK yang ada pada masing-masing daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat UMP/UMK di suatu daerah maka semakin sejahtera masyarakat yang berada didaerah tersebut. Terkadang tingkat UMP/UMK disuatu daerah dengan daerah lain berbeda, tergantung potensi perusahaan yang ada pada daerah tersebut.

Sempat tidak naik pada tahun sebelumnya, upah minimum Kota Samarinda pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.137.675.

Tabel 4.6 Upah Minimum Kota Samarinda dan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur, 2017 – 2022

Tahun	UMK Samarinda (Rupiah)	UMP Kalimantan Timur (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2017	2.442.181	2.339.556
2018	2.654.895	2.543.332
2019	2.868.081	2.747.561
2020	3.112.156	2.981.378
2021	3.112.156	2.981.378
2022	3.137.675	3.014.497

Sumber: https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum

BAB 5

TINGKAT DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk,

dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 menunjukkan rata-rata pengeluaran dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut jenis pengeluarannya. Secara umum, dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata total pengeluaran penduduk kota Samarinda mengalami penurunan. Tahun 2021, penduduk Kota Samarinda memiliki rata-rata total pengeluaran per kapita sebesar 1,680 juta rupiah per bulan. Angka ini turun sebesar 255 ribu rupiah per bulan dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan total pengeluaran tersebut secara merata mempengaruhi penurunan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan.

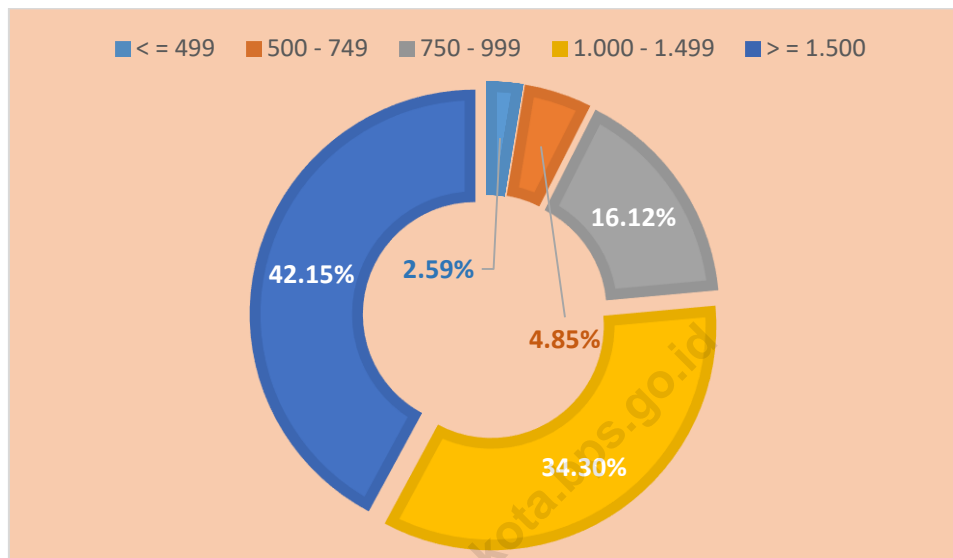
Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Samarinda, 2020 – 2021

Uraian	Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah)		Persentase Pengeluaran (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	832.225	670.649	43,00	39,92
Non Makanan	1.103.405	1.009.467	57,00	60,08
Total	1.935.630	1.680.116	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Bila dilihat lebih jauh, pengeluaran non makanan memiliki kontribusi lebih besar terhadap total pengeluaran penduduk. Rata-rata pengeluaran makanan penduduk pada tahun 2021 adalah sebanyak 670 ribu rupiah per bulan atau sebanyak 39,92 persen dari total pengeluaran. Sementara rata-rata pengeluaran non makanan penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 1,680 juta rupiah per bulan atau 60,08 persen dari total pengeluaran. Lebih tingginya pengeluaran non makanan memberikan

sinyal positif bagi pemerintah tentang kesejahteraan penduduk meskipun selisih antara pengeluaran makanan dan non makanan masih cukup kecil.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional
Catatan: Pengeluaran dalam ribu rupiah

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda, 2021 (Persen)

Menurut golongan pengeluarannya, sebagian besar penduduk berada pada rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di atas satu juta rupiah. Persentase penduduk di rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi pada rentang 1,5 juta rupiah ke atas sebesar 42,15 persen, 34,30 persen penduduk memiliki pengeluaran per kapita pada rentang pengeluaran 1 juta sampai 1,499 juta rupiah per bulan dan sebanyak 20,97 persen penduduk Kota Samarinda memiliki rentang pengeluaran sebesar 500.000-999.999 rupiah per bulan. Namun, masih terdapat sebanyak 2,59 persen penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita kurang dari 500.000 rupiah per bulan.

Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran penduduk Kota Samarinda sudah cukup besar, hal ini bisa dikarenakan daya beli

masyarakat yang kian meningkat ataupun sebagai pertanda bahwa harga barang dan jasa yang semakin tinggi. Apabila hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang kian meningkat, hal ini merupakan pertanda positif bahwa kemajuan ekonomi dan tingkat pendapatan yang semakin baik. Namun, apabila hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat harga, maka ini menandakan bahwa secara riil daya beli masyarakat masih tetap atau justru berkurang.

Konsumsi makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, setiap orang perlu mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman. Dengan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berlaku bijak dalam memilih makanan, tidak semata mempertimbangkan status sosial-ekonomi makanan, namun juga harus seimbang dengan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan dan tumbuh kembang optimal.

Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan kelompok makanan semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2021, konsumsi masyarakat yang berada pada golongan pengeluaran kurang dari 1.500.000 rupiah per bulan, proporsi pengeluaran lebih besar untuk konsumsi kelompok makanan dibandingkan kelompok bukan makanan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan (hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran), pengeluaran untuk kelompok bukan makanan juga ikut meningkat.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran di Kota Samarinda, 2021 (Rupiah)

Golongan Pengeluaran	Makanan	Non-Makanan
(1)	(2)	(3)
< = 499.999	281.849	144.731
500.000 – 749.999	324.230	292.500
750.000 – 999.999	476.854	411.655
1.000.000 – 1.499.999	643.456	602.438
> = 1.500.000	1.069.733	1.636.834

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tabel 5.3 terlihat bahwa rata-rata konsumsi makanan per kapita sebulan menurut sub kelompok di kota Samarinda pada tahun 2021 sebesar 670.649 rupiah. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kategori makanan paling besar digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi, yakni sebesar 237.578 rupiah per bulan atau sebesar 35,43 persen dari total konsumsi makanan per kapita per bulan. Sedangkan pengeluaran makanan terkecil ada pada jenis umbi-umbian yang hanya sebanyak 0,84 persen atau sebesar 5.612 rupiah per kapita per bulan.

Tabel 5.3 Rata-rata Pengeluaran, RSE Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Samarinda, 2021

Kelompok Makanan	Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah)	RSE Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	58.428	2,486	8,71
Umbi-umbian	5.612	10,036	0,84
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	67.064	4,604	10,00
Daging	37.803	5,065	5,64
Telur dan susu	42.022	4,873	6,27
Sayur-sayuran	54.600	4,436	8,14
Kacang-kacangan	13.085	5,292	1,95
Buah-buahan	29.516	10,424	4,40
Minyak dan Kelapa	15.672	3,399	2,34
Bahan minuman	19.837	5,328	2,96
Bumbu-bumbuan	14.674	4,783	2,19
Konsumsi lainnya	14.133	5,586	2,11
Makanan dan minuman jadi	237.578	5,494	35,43
Rokok dan Tembakau	60.625	6,383	9,04
Jumlah	670.649	3,581	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sementara itu, pola pengeluaran penduduk selama sebulan untuk kategori bukan makanan ditampilkan pada tabel 5.4. Tampak bahwa pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga mendominasi total pengeluaran non makanan yakni sebesar 56,49 persen atau sebanyak 570.212 rupiah per kapita per bulan. Disusul dengan pengeluaran aneka barang dan jasa sebanyak 23,94 persen. Pengeluaran non makanan untuk keperluan pesta dan upacara berkontribusi paling

kecil terhadap total pengeluaran rata-rata penduduk untuk kategori non makanan yakni sebesar 29.169 rupiah per kapita per bulan atau sebanyak 2,89 persen dari seluruh pengeluaran non makanan.

Tabel 5.4 Rata-rata Pengeluaran, RSE Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kota Samarinda, 2021

Kelompok Non Makanan	Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah)	RSE Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	570.212	5,290	56,49
Aneka barang dan jasa	241.661	7,885	23,94
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	32.478	9,628	3,22
Barang yang tahan lama	65.036	38,806	6,44
Pajak, pungutan, dan asuransi	70.911	8,053	7,02
Keperluan pesta dan upacara	29.169	29,335	2,89
Jumlah	1.009.467	7,619	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

5.2 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang umumnya selalu dihadapi oleh suatu negara/wilayah. Kemiskinan merupakan penyakit sosial dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai standar tertentu. Banyaknya kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian suatu wilayah. Kemajuan pembangunan ekonomi

diantaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan yang dihitung oleh BPS menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan.

Tabel 5.5 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda, Tahun 2017 – 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	594.645	40.010	4,77
2018	616.365	39.230	4,59
2019	658.307	39.795	4,59
2020	719.710	41.920	4,76
2021	750.055	42.840	4,99

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 42.840 jiwa, terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya (41.920 jiwa) naik sebesar 2,19 persen tahun sebelumnya. Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin tahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai 750.055 rupiah per kapita per bulan.

BAB 6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Kualitas perumahan dan lingkungan yang baik menunjukkan kemampuan sosial ekonomi yang semakin meningkat sehingga tingkat kesejahteraan penduduk secara umum dapat dikatakan sudah semakin baik. Dengan kata lain, status sosial seseorang berhubungan dengan kualitas/kondisi rumah dan lingkungannya. Beberapa komponen perumahan dan lingkungan yang menjadi ukuran adalah luas dan kualitas bahan perumahan, penggunaan air bersih dan jamban keluarga yang sehat, yang dilengkapi dengan penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang permanen, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Salah satu kriteria dari menandakan bahwa suatu rumah merupakan rumah yang layak dan sehat untuk dihuni adalah rumah yang tidak padat huni atau masing-masing anggota rumah tangga menempati minimal 7,2 m² dari luas rumah. Berdasarkan hasil Susenas 2021, persentase rumah tangga dengan luas lantai dibawah 10 m² mengalami penurunan (21,66 persen), yang berimbas meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai di atas 10 m² yakni sebesar 78,34 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga di Kota Samarinda Menurut Luas Lantai Rumah per kapita, 2018– 2021 (persen)

Luas lantai per kapita (m ²)	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<=7,2	12,35	11,81	9,07	12,12
7,3 – 9,9	13,86	15,25	13,00	9,54
>= 10	73,79	72,94	77,93	78,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2021, rumah tinggal dengan atap beton, genteng dan seng mencapai 96,28 persen. Sementara sisanya sebanyak 3,72 persen merupakan tempat tinggal dengan atap terbuat dari Asbes, jerami/ijuk/daun/rumbia dan jenis lainnya. Sedangkan menurut jenis

dinding terluas, sebanyak 54,67 persen penduduk tinggal dengan dinding terluas terbuat dari tembok, kemudian rumah tangga dengan dinding terluas terbuat dari Kayu/Batang Kayu sebesar 45,21 persen.

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2021, rumah tangga di kota Samarinda yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum utama mencapai 96,46 persen. Semakin mengecilnya angka tersebut menggambarkan bahwa masyarakat semakin menaruh perhatian akan kesehatannya dengan beralih menggunakan air bersih sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terutama perusahaan/BUMD yang menyediakan air bersih bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan air bersih bagi masyarakat baik dari sisi akses maupun biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, penduduk kota Samarinda seluruhnya telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama (99,78 persen). Tidak ada lagi rumah tangga yang menggunakan non listrik sebagai penerangan.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Samarinda menurut Fasilitas Rumah Tinggal, 2018-2021(persen)

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tangga yang menggunakan sumber air minum bersih	98,63	99,85	97,78	98,13
Rumah Tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB sendiri	94,08	89,11	92,88	93,37
Rumah Tangga yang memiliki kloset leher angsa	98,16	98,35	99,05	98,89
Rumah Tangga yang memiliki tempat pembuangan air tinja berupa Tangki septik/IPAL/SPAL	95,75	92,28	94,56	97,66

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Cerminan kesejahteraan penduduk yang semakin baik terwujud pada kesadaran masyarakat yang semakin menginginkan sanitasi lingkungan yang baik. Salah satu ukuran yang dapat menunjukkan keadaan ini adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang baik adalah kakus dengan penampungan akhir berupa tangki septik, karena dapat menahan rembesan buangan air kotor maupun limbah ke dalam sumber air minum yang digunakan, yang dapat menurunkan kualitas air untuk keperluan rumah tangga.

Rumah tangga yang menggunakan WC dengan penampungan akhir berupa tangki septik/IPAL/SPAL hingga tahun 2021 cukup tinggi dan merupakan proporsi terbesar yaitu 97,66 persen dibanding jumlah rumah tangga yang menggunakan WC dengan penampungan akhir langsung ke

sungai / danau / laut / kolam / sawah / lubang tanah / pantai / tanah lapang / kebun / lainnya sebesar 2,34 persen.

Dari sisi ketersediaan fasilitas Buang Air Besar (BAB), sebagian besar penduduk sudah memiliki sendiri fasilitas tersebut. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri ada sebanyak 93,37 persen. Sedangkan sebanyak 6,10 persen rumah tangga menggunakan fasilitas BAB bersama, dan sebesar 0,52 menggunakan fasilitas BAB umum. Sudah tidak ada rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas BAB. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya sarana sanitasi bagi setiap rumah tangga.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2021, sebanyak 56,92 persen rumah tangga di Kota Samarinda telah memiliki sendiri bangunan tempat tinggal. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 60,94 persen. Selanjutnya disusul dengan rumah tangga dengan status tempat tinggal kontrak/sewa sebanyak 27,81 persen. Sebanyak 13,84 persen rumah tangga menempati bebas sewa. Kemudian sisanya

1,42 persen tinggal di rumah dinas atau rumah milik orang tua/sanak/saudara dan lainnya.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Samarinda, 2017 – 2021 (persen)

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik Sendiri	59,36	59,49	58,24	60,94	56,92
Kontrak/Sewa	27,57	27,43	25,3	27,43	27,81
Bebas Sewa	11,26	12,33	15,41	11,39	13,84
Dinas					
Rumah Milik Orang Tua/Sanak/Saudara dan lainnya	1,81	0,75	1,05	0,24	1,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

BAB 7

SOSIAL LAINNYA

Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan tersier seperti perjalanan wisata dapat memberikan gambaran dan menjadi salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Seseorang biasanya melakukan perjalanan wisata untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam, menyalurkan hobi, dan lain-lain untuk mencari kesenangan. Di lain sisi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian pesat juga dapat menjadi indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Penguasaan teknologi dan alat komunikasi seperti telepon seluler dan perangkat komputer atau *laptop* menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat saat ini. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Tingkat kesejahteraan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ketersediaan akses terhadap pelayanan publik dan tingkat keamanan. Dalam ketersediaan pelayanan publik, kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis sering kali dibutuhkan oleh masyarakat. Bila masyarakat dimudahkan dalam berusaha melalui kemudahan kredit usaha, maka hal itu akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraannya. Begitu juga dalam penyediaan pelayanan kesehatan gratis, yang tentunya akan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Dengan ketersediaan layanan kesehatan gratis, maka

pendapatan masyarakat dapat dialihkan pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Tingkat keamanan lingkungan merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Di lain pihak, tingkat keamanan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sulitnya keadaan perekonomian, akan mendesak seseorang untuk melakukan kejahatan. Atau dengan kata lain, semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

7.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Secara umum penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kota Samarinda yang menggunakan telepon seluler sebanyak 92,06 persen dari total penduduk, dan yang memiliki telepon seluler sebanyak 84,11 persen. Bila dilihat lebih jauh menurut jenis kelamin, ternyata proporsi penduduk laki-laki yang memiliki telepon seluler lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sebanyak 87,18 persen penduduk laki-laki telah

memiliki telepon seluler pada tahun 2021. Sementara hanya sebanyak 80,94 persen perempuan yang memiliki telepon seluler.

Tingginya penerimaan masyarakat terhadap teknologi terutama alat komunikasi merupakan dampak semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah maupun penyedia layanan telekomunikasi *mobile* agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena komunikasi menggunakan perangkat *mobile* sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Pemerintah juga harus terus meningkatkan kapasitas jaringan yang dimiliki serta memberikan kebijakan-kebijakan agar tarif telepon seluler semakin terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, semakin berkembangnya teknologi juga menuntut masyarakat untuk dapat mulai menggunakan komputer baik PC/Desktop, Laptop/notebook. Tablet. Dengan menggunakan komputer, pekerjaan akan terselesaikan lebih mudah dan cepat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam bekerja. Pada tahun 2021, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan perangkat komputer ada sebanyak 20,90 persen. Angka ini tergolong rendah, karena baru sepertiga penduduk yang menggunakan komputer dalam kegiatannya. Pemerintah diharapkan agar lebih aktif mengedukasi masyarakat untuk mulai memanfaatkan komputer guna meningkatkan produktivitas penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

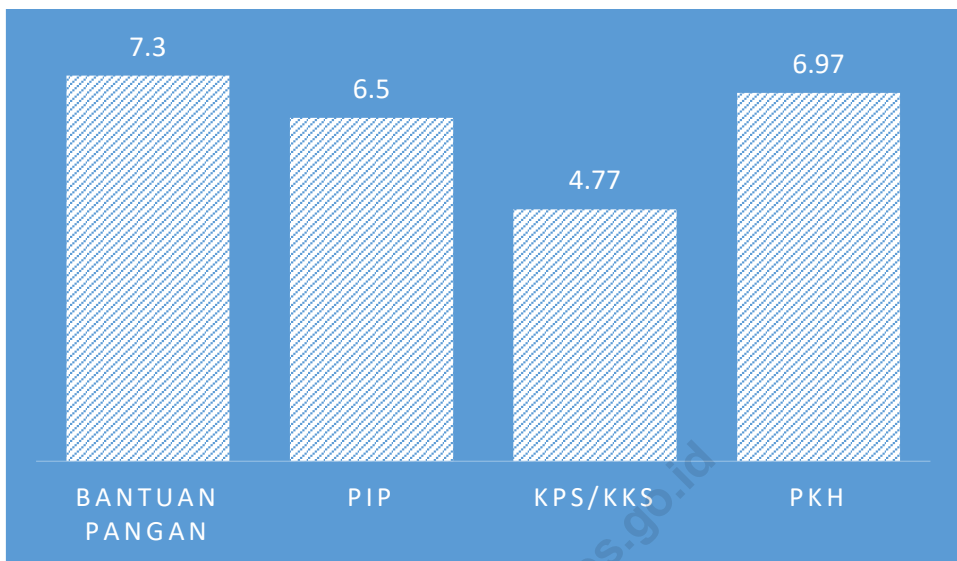
Berkembangnya teknologi dan informasi tidak hanya terlihat dari banyaknya penggunaan telepon seluler/HP. Seiring perkembangan zaman, teknologi internet semakin dibutuhkan masyarakat agar dapat terhubung dalam suatu jaringan. Media internet dianggap memiliki sifat instan, interaktif, dan menarik. Dari data Susenas, pada tahun 2021 penduduk berumur 5 tahun ke atas yang telah melakukan/memiliki akses

internet sebanyak 76,55 persen dan mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sementara, dilihat dari proporsinya, pengguna laki-laki masih lebih banyak dibandingkan pengguna perempuan, yakni masing-masing sebanyak 78,91 persen dan 74,09 persen. Angka ini terbilang masih minim bila kita melihat angka pengguna telepon seluler yang telah dijabarkan sebelumnya.

7.2 Program Pelindungan Sosial dan Pelayanan Kesehatan

Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yakni melalui program perlindungan sosial. Pemerintah menyediakan program perlindungan sosial bagi orang miskin dengan memberikan subsidi kepada keluarga yang miskin dan rentan terhadap kemiskinan sehingga mereka dapat berinvestasi di masa depan dengan memastikan bahwa anak-anak dapat tetap bersekolah, memberikan makanan yang cukup serta mendapatkan perawatan kesehatan yang cukup. Beberapa program perlindungan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan yang meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pada tahun 2021, terdapat rumah tangga yang memperoleh beberapa program bantuan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya program ini diharapkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Kota Samarinda dapat semakin ditekan. Diharapkan dengan adanya program ini, rumah tangga miskin dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu keluar dari kemiskinannya.



Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan yang Diterima di Kota Samarinda, 2021 (persen)

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dengan tubuh yang sehat maka seseorang akan semakin produktif dalam melakukan aktivitas. Sehingga ketika terjadi masalah kesehatan tentu akan berdampak pada sisi finansial bagi penderita, baik berkurangnya produktivitas yang dihasilkan maupun pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengobatan.

Sejak tahun 2015, pemerintah mulai fokus menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di sisi kesehatan. Pemerintah memulai program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan dan wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini sangat diperlukan terlebih bagi masyarakat yang masih tergolong miskin. Jaminan kesehatan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin besarnya jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Tabel 7.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda, 2021 (persen)

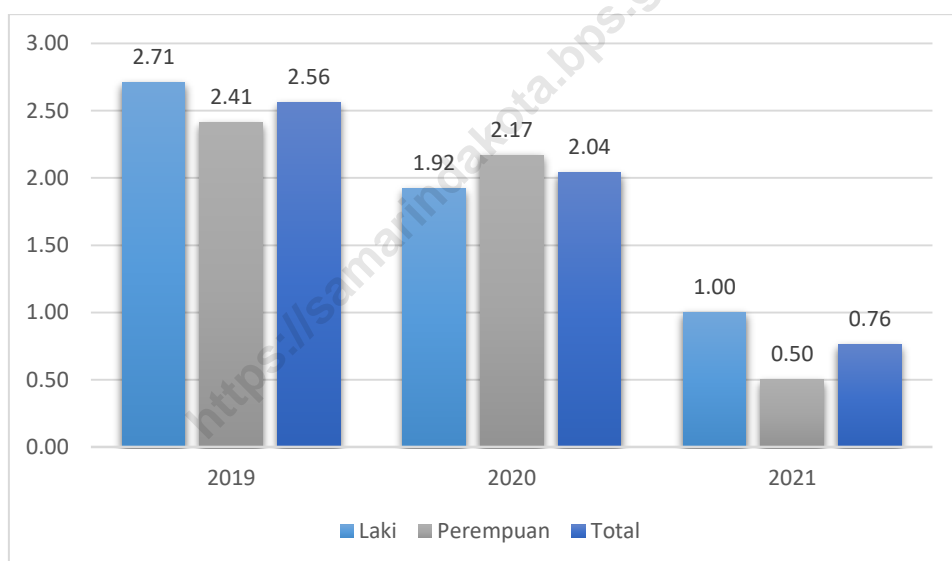
Jaminan Kesehatan	Jumlah
(1)	(4)
BPJS	71,91
Jamkesda	0,00
Asuransi Swasta	1,07
Perusahaan/Kantor	4,74
Tidak Punya	23,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2021, sebanyak 71,91 persen penduduk telah memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS. Berdasarkan hasil Susenas 2021, terlihat bahwa masih cukup banyak penduduk Samarinda yang belum memiliki jaminan kesehatan, persentasenya mencapai 23,00 persen. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat terhadap berbagai manfaat jaminan kesehatan serta bagaimana memanfaatkan jaminan kesehatan tersebut. Hal ini dianggap perlu karena sesuai amanat Undang-Undang, bahwa semua penduduk di Indonesia harus memiliki jaminan kesehatan sehingga masalah ini menjadi tantangan bagi pemerintah Samarinda untuk mendorong masyarakat agar mendaftarkan dalam program jaminan kesehatan nasional.

7.3 Kondisi Keamanan

Selain bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2021 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.



Gambar 7.2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan di Kota Samarinda, 2019 – 2021(persen)

Sebanyak 0,76 persen dari total penduduk menjadi korban kejahatan sejak 1 Januari – Desember 2021. Angka ini berkurang jika dibandingkan dengan persentase korban kejahatan pada rentang sebelumnya yang mencatat angka sebesar 2,04 persen dari total penduduk. Jika dilihat menurut jenis kelamin, korban kejahatan didominasi

oleh penduduk laki-laki yakni sebanyak 1,00 persen dari total penduduk. Sementara, terdapat 0,5 persen penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan sejak 1 Januari – Desember 2021. Walaupun secara persentase terbilang kecil, tapi angka tersebut menggambarkan bahwa masih perlunya pihak keamanan untuk meningkatkan keamanan kota Samarinda, sekaligus memberikan tindakan tegas bagi pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

<https://samarindakota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

- Enlighten The Nation -



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA**
BPS Statistics of Samarinda Municipality

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 33 Samarinda 75117
Telp: 0541-743661 Email: bps6472@bps.go.id

ISSN 2716-1153



9 772716 115026 >